



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
6. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja selama satu periode pelaporan.
11. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
14. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
17. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
24. Pendapatan-Laporan Operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
25. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
26. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
27. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
28. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja, dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 2.290.242.967.778,00	
b. belanja	Rp 1.614.272.929.325,00	
c. transfer	<u>Rp 521.205.284.255,00</u>	
defisit		Rp 154.764.754.198,00
d. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp 148.625.215.915,8	
		3
2. pengeluaran	<u>Rp 19.122.750.150,00</u>	
pembiayaan neto		Rp 129.502.465.765,83

Pasal 4

(1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp123.315.248.684,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp 2.166.927.719.094,00
b. realisasi		<u>Rp 2.290.242.967.778,00</u>
selisih lebih		<u>Rp 123.315.248.684,00</u>
(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah (Rp) dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.767.029.625.215,83	
b. realisasi		<u>Rp 1.614.272.929.325,00</u>
selisih kurang		<u>(Rp 152.756.695.890,83)</u>
(3) Selisih anggaran transfer dengan realisasi transfer sejumlah (Rp8.032.844.571,00) dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran transfer setelah perubahan	Rp 529.238.128.826,00	
b. realisasi		<u>Rp 521.205.284.255,00</u>
selisih kurang		<u>(Rp 8.032.844.571,00)</u>
(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp25.424.719.250,17 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp 129.340.034.947,83	
b. realisasi		<u>Rp 154.764.754.198,00</u>
selisih lebih		<u>Rp 25.424.719.250,17</u>

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp162.430.818,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	148.462.785.097,83
b. realisasi	Rp	148.625.215.915,83
selisih kurang	Rp	162.430.818,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	19.122.750.150,00
b. realisasi	Rp	19.122.750.150,00
selisih	Rp	0,00
(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp162.430.818,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	129.340.034.947,83
b. realisasi	Rp	129.502.465.765,83
selisih kurang	Rp	162.430.818,00

Pasal 5

Perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 yang dituangkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	148.165.025.028,83
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	148.165.025.028,83
c. SilPA	Rp	284.267.219.963,83
d. koreksi pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e. lain-lain	Rp	0,00
saldo anggaran lebih akhir	Rp	284.267.219.963,83

Pasal 6

Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 yang dituangkan dalam Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	3.303.359.268.867,61
b. jumlah kewajiban	Rp	40.729.600.868,40
c. jumlah ekuitas	Rp	3.262.629.667.999,21

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan – Laporan Operasional	Rp 1.923.657.356.814,48
b. Beban	Rp 1.764.997.743.855,56
surplus Laporan Operasional	<u>Rp 154.500.658.407,91</u>

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp 148.167.036.957,83
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 420.412.899.907,00
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp 265.648.145.709,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 18.662.559.263,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp 595.092,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp 284.268.636.800,83

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas awal per 1 Januari 2021	Rp 3.078.571.850.213,42
b. Surplus Laporan Operasional	Rp 154.500.658.407,91
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar ekuitas akhir	Rp 29.557.159.377,88
	<u>Rp 3.262.629.667.999,21</u>

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, untuk tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;

- 2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok pembiayaan;
- 4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan Piutang Daerah;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan Aset tetap;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi Aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi Aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, yang terdiri atas:
 - 1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 2. Lampiran XX.2 : ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah
- t. Lampiran XX

Pasal 12

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran XX : ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- b. Lampiran XXI : laporan kinerja.

Pasal 13

Rincian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 7 SERI A NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 7-130/2022



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	PENDAPATAN DAERAH	2.166.927.719.094,00	2.290.242.967.778,00	123.315.248.684,00	105,69
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	179.576.468.281,00	306.995.903.769,00	127.419.435.488,00	170,96
1	Pendidikan	25.200.600,00	27.360.600,00	2.160.000,00	108,57
2-19.0-00.0-01.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25.200.600,00	27.360.600,00	2.160.000,00	108,57
2	Kesehatan	178.665.329.681,00	305.795.865.789,00	127.130.536.108,00	171,16
0-00.0-00.0-01.00	DINAS KESEHATAN	45.259.624.556,00	88.261.555.323,00	43.001.930.767,00	195,01
0-00.0-00.0-02.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	133.405.705.125,00	217.534.310.466,00	84.128.605.341,00	163,06
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	810.938.000,00	1.089.100.098,00	278.162.098,00	134,30
0-00.0-00.0-01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	810.938.000,00	1.089.100.098,00	278.162.098,00	134,30
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	75.000.000,00	83.528.600,00	8.528.600,00	111,37
1-03.2-10.0-02.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	75.000.000,00	83.528.600,00	8.528.600,00	111,37
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	48.682,00	48.682,00	0,00
0-00.0-00.0-05.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	48.682,00	48.682,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20.705.445.003,00	15.752.796.750,00	(4.952.648.253,00)	76,08
6	Lingkungan Hidup	335.776.100,00	236.052.910,00	(99.723.190,00)	70,30
2-11.0-00.0-01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	335.776.100,00	236.052.910,00	(99.723.190,00)	70,30
7	Perhubungan	7.776.742.515,00	3.860.603.300,00	(3.916.139.215,00)	49,64
2-15.0-00.0-01.00	DINAS PERHUBUNGAN	7.776.742.515,00	3.860.603.300,00	(3.916.139.215,00)	49,64
8	Komunikasi dan Informatika	749.995.740,00	923.967.000,00	173.971.260,00	123,20
2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	749.995.740,00	923.967.000,00	173.971.260,00	123,20

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.645.361.648,00	9.667.500.221,00	(977.861.427,00)	90,81
0-00.0-00.0-00.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	10.645.361.648,00	9.667.500.221,00	(977.861.427,00)	90,81
10	Kebudayaan	1.197.569.000,00	1.064.673.319,00	(132.895.681,00)	88,90
2-22.2-26.0-00.03	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.197.569.000,00	1.064.673.319,00	(132.895.681,00)	88,90
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	160.713.745,00	163.269.570,00	2.555.825,00	101,59
11	Pertanian	155.853.745,00	158.409.570,00	2.555.825,00	101,64
3-27.2-09.3-25.01	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	155.853.745,00	158.409.570,00	2.555.825,00	101,64
12	Perindustrian	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	197.790.200,00	183.211.500,00	(14.578.700,00)	92,63
13	Sekretariat Daerah	197.790.200,00	183.211.500,00	(14.578.700,00)	92,63
4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	197.790.200,00	183.211.500,00	(14.578.700,00)	92,63
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.966.195.271.565,00	1.967.039.395.889,00	844.124.324,00	100,04
14	Keuangan	1.966.195.271.565,00	1.967.039.395.889,00	844.124.324,00	100,04
5-02.0-00.0-00.04	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	1.966.195.271.565,00	1.967.039.395.889,00	844.124.324,00	100,04
6	UNSUR KEWILAYAHAN	92.030.300,00	108.390.300,00	16.360.000,00	117,78
15	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	92.030.300,00	108.390.300,00	16.360.000,00	117,78
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN GRABAG	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN NGOMBOL	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN PURWODADI	6.124.800,00	22.124.800,00	16.000.000,00	361,23
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN BAGELEN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN KALIGESING	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN PURWOREJO	18.555.000,00	18.555.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN BANYUURIP	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN BAYAN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN KUTOARJO	2.351.000,00	2.351.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN BUTUH	13.412.000,00	13.412.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN PITURUH	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN KEMIRI	5.172.500,00	5.532.500,00	360.000,00	106,96
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN BRUNO	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN GEBANG	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN LOANO	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	100,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN BENER	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
	BELANJA DAERAH	2.296.267.754.041,83	2.135.478.213.580,00	(160.789.540.461,83)	93,00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.381.325.759.094,00	1.250.972.233.134,00	(130.353.525.960,00)	90,56
1	Pendidikan	674.620.568.559,00	603.932.089.802,00	(70.688.478.757,00)	89,52
2-19.0-00.0-01.00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	674.620.568.559,00	603.932.089.802,00	(70.688.478.757,00)	89,52
5.1	BELANJA OPERASI	639.501.478.914,00	566.246.698.186,00	(73.254.780.728,00)	88,55
5.1.1	Belanja Pegawai	522.496.127.843,00	458.619.394.195,00	(63.876.733.648,00)	87,77
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.982.400.971,00	89.938.822.991,00	(6.043.577.980,00)	93,70
5.1.5	Belanja Hibah	21.022.950.100,00	17.688.481.000,00	(3.334.469.100,00)	84,14
5.2	BELANJA MODAL	35.119.089.645,00	37.685.391.616,00	2.566.301.971,00	107,31
2	Kesehatan	471.383.663.210,00	428.570.753.283,00	(42.812.909.927,00)	90,92
0-00.0-00.0-01.00	DINAS KESEHATAN	251.827.648.454,00	225.476.870.874,00	(26.350.777.580,00)	89,54
5.1	BELANJA OPERASI	233.499.088.177,00	210.048.416.019,00	(23.450.672.158,00)	89,96
5.1.1	Belanja Pegawai	97.510.988.734,00	96.721.558.432,00	(789.430.302,00)	99,19
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	135.931.599.443,00	113.326.857.587,00	(22.604.741.856,00)	83,37
5.1.5	Belanja Hibah	56.500.000,00	0,00	(56.500.000,00)	0,00
5.2	BELANJA MODAL	18.328.560.277,00	15.428.454.855,00	(2.900.105.422,00)	84,18
0-00.0-00.0-02.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	219.556.014.756,00	203.093.882.409,00	(16.462.132.347,00)	92,50
5.1	BELANJA OPERASI	191.870.208.406,00	178.243.009.492,00	(13.627.198.914,00)	92,90
5.1.1	Belanja Pegawai	68.076.614.913,00	80.702.523.884,00	12.625.908.971,00	118,55
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	123.793.593.493,00	97.540.485.608,00	(26.253.107.885,00)	78,79
5.2	BELANJA MODAL	27.685.806.350,00	24.850.872.917,00	(2.834.933.433,00)	89,76
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	202.180.621.381,00	189.059.090.904,00	(13.121.530.477,00)	93,51
0-00.0-00.0-01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	202.180.621.381,00	189.059.090.904,00	(13.121.530.477,00)	93,51
5.1	BELANJA OPERASI	54.418.252.109,00	53.424.851.840,00	(993.400.269,00)	98,17
5.1.1	Belanja Pegawai	12.476.321.155,00	11.977.122.959,00	(499.198.196,00)	96,00
5.1.1	Belanja Pegawai	30.160.000,00	10.920.000,00	(19.240.000,00)	36,21
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.089.001.449,00	26.714.511.892,00	(374.489.557,00)	98,62
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.148.221.278,00	1.135.906.890,00	(12.314.388,00)	98,93
5.1.5	Belanja Hibah	3.685.596.830,00	3.679.108.130,00	(6.488.700,00)	99,82
5.1.5	Belanja Hibah	9.988.951.397,00	9.907.281.969,00	(81.669.428,00)	99,18
5.2	BELANJA MODAL	147.762.369.272,00	135.634.239.064,00	(12.128.130.208,00)	91,79
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.090.136.513,00	8.671.620.488,00	(418.516.025,00)	95,40
1-03.2-10.0-02.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9.090.136.513,00	8.671.620.488,00	(418.516.025,00)	95,40
5.1	BELANJA OPERASI	7.538.725.513,00	7.301.817.687,00	(236.907.826,00)	96,86

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
5	5.1.1	Belanja Pegawai	2.780.084.788,00	2.629.060.980,00	(151.023.808,00)	94,57	
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	883.028.225,00	863.335.207,00	(19.693.018,00)	97,77	
	5.1.5	Belanja Hibah	2.242.080.000,00	2.242.080.000,00	0,00	100,00	
	5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.633.532.500,00	1.567.341.500,00	(66.191.000,00)	95,95	
	5.2	BELANJA MODAL	1.551.411.000,00	1.369.802.801,00	(181.608.199,00)	88,29	
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	17.871.695.281,00	16.956.724.724,00	(914.970.557,00)	94,88	
	0-00.0-00.0-03.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	13.114.738.944,00	12.297.307.805,00	(817.431.139,00)	93,77	
	5.1	BELANJA OPERASI	10.223.102.944,00	9.665.072.805,00	(558.030.139,00)	94,54	
	5.1.1	Belanja Pegawai	5.858.944.454,00	5.587.053.096,00	(271.891.358,00)	95,36	
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.364.158.490,00	4.078.019.709,00	(286.138.781,00)	93,44	
	5.2	BELANJA MODAL	2.891.636.000,00	2.632.235.000,00	(259.401.000,00)	91,03	
	0-00.0-00.0-05.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.756.956.337,00	4.659.416.919,00	(97.539.418,00)	97,95	
	5.1	BELANJA OPERASI	4.572.349.337,00	4.477.652.919,00	(94.696.418,00)	97,93	
	5.1.1	Belanja Pegawai	2.638.417.843,00	2.595.445.985,00	(42.971.858,00)	98,37	
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.933.931.494,00	1.882.206.934,00	(51.724.560,00)	97,33	
	5.2	BELANJA MODAL	184.607.000,00	181.764.000,00	(2.843.000,00)	98,46	
	6		Sosial	6.179.074.150,00	3.781.953.933,00	(2.397.120.217,00)	61,21
		1-06.2-14.2-08.06	DINSOSDUKKBPPPA	6.179.074.150,00	3.781.953.933,00	(2.397.120.217,00)	61,21
5.1		BELANJA OPERASI	6.179.074.150,00	3.781.953.933,00	(2.397.120.217,00)	61,21	
5.1.1		Belanja Pegawai	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	1.736.264.150,00	1.086.836.025,00	(649.428.125,00)	62,60	
5.1.6		Belanja Bantuan Sosial	4.442.050.000,00	2.694.357.908,00	(1.747.692.092,00)	60,66	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	122.066.007.077,00	114.551.772.767,00	(7.514.234.310,00)	93,84	
		Tenaga Kerja	1.217.949.217,00	1.202.736.740,00	(15.212.477,00)	98,75	
0-00.0-00.0-00.00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.217.949.217,00	1.202.736.740,00	(15.212.477,00)	98,75	
5.1		BELANJA OPERASI	1.217.949.217,00	1.202.736.740,00	(15.212.477,00)	98,75	
5.1.1		Belanja Pegawai	15.180.000,00	15.020.000,00	(160.000,00)	98,95	
5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	1.202.769.217,00	1.187.716.740,00	(15.052.477,00)	98,75	
8		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.213.266.404,00	5.738.947.157,00	(474.319.247,00)	92,37	
	1-06.2-14.2-08.06	DINSOSDUKKBPPPA	6.213.266.404,00	5.738.947.157,00	(474.319.247,00)	92,37	
	5.1	BELANJA OPERASI	6.013.266.404,00	5.539.037.657,00	(474.228.747,00)	92,11	
	5.1.1	Belanja Pegawai	4.652.931.904,00	4.524.166.884,00	(128.765.020,00)	97,23	
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.360.334.500,00	1.014.870.773,00	(345.463.727,00)	74,60	

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
9	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.909.500,00	(90.500,00)	99,95
	3-27.2-09.3-25.01	Pangan	848.116.200,00	834.790.924,00	(13.325.276,00)	98,43
10		DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	848.116.200,00	834.790.924,00	(13.325.276,00)	98,43
	5.1	BELANJA OPERASI	848.116.200,00	834.790.924,00	(13.325.276,00)	98,43
	5.1.1	Belanja Pegawai	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	149.587.200,00	142.551.924,00	(7.035.276,00)	95,30
	5.1.5	Belanja Hibah	697.089.000,00	690.799.000,00	(6.290.000,00)	99,10
	1-03.2-10.0-02.00	Pertanahan	184.306.000,00	174.655.422,00	(9.650.578,00)	94,76
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	184.306.000,00	174.655.422,00	(9.650.578,00)	94,76
	5.1	BELANJA OPERASI	184.306.000,00	174.655.422,00	(9.650.578,00)	94,76
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	184.306.000,00	174.655.422,00	(9.650.578,00)	94,76
	11		Lingkungan Hidup	17.357.063.674,00	16.546.549.613,00	(810.514.061,00)
2-11.0-00.0-01.00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.357.063.674,00	16.546.549.613,00	(810.514.061,00)	95,33
5.1		BELANJA OPERASI	15.325.105.774,00	14.691.240.787,00	(633.864.987,00)	95,86
5.1.1		Belanja Pegawai	8.188.778.803,00	7.896.775.796,00	(292.003.007,00)	96,43
5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	6.699.719.771,00	6.575.037.791,00	(124.681.980,00)	98,14
5.1.5		Belanja Hibah	436.607.200,00	219.427.200,00	(217.180.000,00)	50,26
5.2		BELANJA MODAL	2.031.957.900,00	1.855.308.826,00	(176.649.074,00)	91,31
2-12.0-00.0-01.00		Administrasi Kependudukan dan Capil	9.699.149.748,00	9.386.509.441,00	(312.640.307,00)	96,78
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.699.149.748,00	9.386.509.441,00	(312.640.307,00)	96,78
12		5.1	BELANJA OPERASI	9.059.916.748,00	8.809.561.065,00	(250.355.683,00)
	5.1.1	Belanja Pegawai	6.063.031.148,00	5.919.972.989,00	(143.058.159,00)	97,64
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.996.885.600,00	2.889.588.076,00	(107.297.524,00)	96,42
	5.2	BELANJA MODAL	639.233.000,00	576.948.376,00	(62.284.624,00)	90,26
	2-13.0-00.0-01.00	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.880.989.714,00	6.399.176.583,00	(481.813.131,00)	93,00
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.880.989.714,00	6.399.176.583,00	(481.813.131,00)	93,00
	5.1	BELANJA OPERASI	6.747.549.714,00	6.266.329.583,00	(481.220.131,00)	92,87
	5.1.1	Belanja Pegawai	4.507.310.633,00	4.053.734.796,00	(453.575.837,00)	89,94
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.240.239.081,00	2.212.594.787,00	(27.644.294,00)	98,77
	5.2	BELANJA MODAL	133.440.000,00	132.847.000,00	(593.000,00)	99,56
14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.507.211.800,00	7.753.815.590,00	(753.396.210,00)	91,14
	1-06.2-14.2-08.06	DINSOSDUKKBPPA	8.507.211.800,00	7.753.815.590,00	(753.396.210,00)	91,14

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
15	5.1	BELANJA OPERASI	7.107.135.800,00	6.386.382.590,00	(720.753.210,00)	89,86	
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.107.135.800,00	6.386.382.590,00	(720.753.210,00)	89,86	
	5.2	BELANJA MODAL	1.400.076.000,00	1.367.433.000,00	(32.643.000,00)	97,67	
	2-15.0-00.0-01.00	Perhubungan	12.934.732.696,00	12.514.160.276,00	(420.572.420,00)	96,75	
		DINAS PERHUBUNGAN	12.934.732.696,00	12.514.160.276,00	(420.572.420,00)	96,75	
	5.1	BELANJA OPERASI	12.405.477.696,00	11.993.090.676,00	(412.387.020,00)	96,68	
	5.1.1	Belanja Pegawai	4.330.175.796,00	4.063.046.215,00	(267.129.581,00)	93,83	
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.075.301.900,00	7.930.044.461,00	(145.257.439,00)	98,20	
	5.2	BELANJA MODAL	529.255.000,00	521.069.600,00	(8.185.400,00)	98,45	
	16	2-16.2-20.2-21.01	Komunikasi dan Informatika	9.473.503.953,00	8.977.984.644,00	(495.519.309,00)	94,77
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9.473.503.953,00	8.977.984.644,00	(495.519.309,00)	94,77	
5.1		BELANJA OPERASI	7.799.842.253,00	7.308.222.844,00	(491.619.409,00)	93,70	
5.1.1		Belanja Pegawai	2.754.955.253,00	2.480.033.527,00	(274.921.726,00)	90,02	
5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	4.615.992.000,00	4.399.391.059,00	(216.600.941,00)	95,31	
5.1.5		Belanja Hibah	428.895.000,00	428.798.258,00	(96.742,00)	99,98	
5.2		BELANJA MODAL	1.673.661.700,00	1.669.761.800,00	(3.899.900,00)	99,77	
17		0-00.0-00.0-00.00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.671.234.147,00	11.113.237.048,00	(557.997.099,00)	95,22
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	11.671.234.147,00	11.113.237.048,00	(557.997.099,00)	95,22
		5.1	BELANJA OPERASI	11.671.234.147,00	11.113.237.048,00	(557.997.099,00)	95,22
	5.1.1	Belanja Pegawai	9.740.824.747,00	9.218.389.929,00	(522.434.818,00)	94,64	
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.887.493.200,00	1.854.930.919,00	(32.562.281,00)	98,27	
	5.1.5	Belanja Hibah	42.916.200,00	39.916.200,00	(3.000.000,00)	93,01	
	18	2-18.0-00.0-00.01	Penanaman Modal	3.938.410.148,00	3.448.285.674,00	(490.124.474,00)	87,56
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.938.410.148,00	3.448.285.674,00	(490.124.474,00)	87,56
		5.1	BELANJA OPERASI	3.938.410.148,00	3.448.285.674,00	(490.124.474,00)	87,56
		5.1.1	Belanja Pegawai	2.642.337.148,00	2.191.051.234,00	(451.285.914,00)	82,92
5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	1.296.073.000,00	1.257.234.440,00	(38.838.560,00)	97,00	
19		2-19.0-00.0-01.00	Kepemudaan dan Olah Raga	7.396.230.900,00	7.193.899.180,00	(202.331.720,00)	97,26
			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.396.230.900,00	7.193.899.180,00	(202.331.720,00)	97,26
		5.1	BELANJA OPERASI	2.396.230.900,00	2.346.514.738,00	(49.716.162,00)	97,93
		5.1.1	Belanja Pegawai	1.440.000,00	760.000,00	(680.000,00)	52,78
		5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.092.088.900,00	1.068.217.813,00	(23.871.087,00)	97,81
	5.1.5	Belanja Hibah	1.302.702.000,00	1.277.536.925,00	(25.165.075,00)	98,07	

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)					
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)				
3	20	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000.000,00	4.847.384.442,00	(152.615.558,00)	96,95		
		2-16.2-20.2-21.01	Statistik	109.111.000,00	104.551.344,00	(4.559.656,00)	95,82		
	21	2-16.2-20.2-21.01	5.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	109.111.000,00	104.551.344,00	(4.559.656,00)	95,82	
			5.1.1	BELANJA OPERASI	109.111.000,00	104.551.344,00	(4.559.656,00)	95,82	
		5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	109.111.000,00	104.551.344,00	(4.559.656,00)	95,82		
		2-16.2-20.2-21.01	21	Persandian	29.342.500,00	21.683.931,00	(7.658.569,00)	73,90	
			21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.342.500,00	21.683.931,00	(7.658.569,00)	73,90	
		5.1	BELANJA OPERASI	29.342.500,00	21.683.931,00	(7.658.569,00)	73,90		
		5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.342.500,00	21.683.931,00	(7.658.569,00)	73,90		
		22	2-22.2-26.0-00.03	22	Kebudayaan	11.130.308.262,00	10.893.305.885,00	(237.002.377,00)	97,87
				22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	11.130.308.262,00	10.893.305.885,00	(237.002.377,00)	97,87
		5.1	BELANJA OPERASI	7.339.560.372,00	7.102.558.255,00	(237.002.117,00)	96,77		
	5.1.1	Belanja Pegawai	4.946.720.915,00	4.726.721.779,00	(219.999.136,00)	95,55			
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.198.892.457,00	2.190.758.476,00	(8.133.981,00)	99,63			
	5.1.5	Belanja Hibah	193.947.000,00	185.078.000,00	(8.869.000,00)	95,43			
	23	2-23.2-24.0-00.02	5.2	BELANJA MODAL	3.790.747.890,00	3.790.747.630,00	(260,00)	100,00	
			23	Perpustakaan	10.482.069.650,00	8.674.080.193,00	(1.807.989.457,00)	82,75	
		2-23.2-24.0-00.02	23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.482.069.650,00	8.674.080.193,00	(1.807.989.457,00)	82,75	
			5.1	BELANJA OPERASI	88.468.400,00	87.804.167,00	(664.233,00)	99,25	
		5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	88.468.400,00	87.804.167,00	(664.233,00)	99,25		
24		2-23.2-24.0-00.02	5.2	BELANJA MODAL	10.393.601.250,00	8.586.276.026,00	(1.807.325.224,00)	82,61	
	24		Kearsipan	3.993.011.064,00	3.573.403.122,00	(419.607.942,00)	89,49		
	2-23.2-24.0-00.02	24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.993.011.064,00	3.573.403.122,00	(419.607.942,00)	89,49		
		5.1	BELANJA OPERASI	3.993.011.064,00	3.573.403.122,00	(419.607.942,00)	89,49		
	5.1.1	Belanja Pegawai	3.482.898.264,00	3.091.215.827,00	(391.682.437,00)	88,75			
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	510.112.800,00	482.187.295,00	(27.925.505,00)	94,53			
	25	3-27.2-09.3-25.01	25	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	54.086.529.750,00	52.585.157.989,00	(1.501.371.761,00)	97,22	
			25	Kelautan dan Perikanan	1.184.324.850,00	1.078.741.470,00	(105.583.380,00)	91,08	
3-27.2-09.3-25.01		25	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.184.324.850,00	1.078.741.470,00	(105.583.380,00)	91,08		
		5.1	BELANJA OPERASI	1.184.324.850,00	1.078.741.470,00	(105.583.380,00)	91,08		
5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	61.104.850,00	61.103.900,00	(950,00)	100,00			
5.1.5		Belanja Hibah	1.123.220.000,00	1.017.637.570,00	(105.582.430,00)	90,60			

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
26	Pariwisata	16.571.882.809,00	15.911.803.813,00	(660.078.996,00)	96,02
2-22.2-26.0-00.03	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	16.571.882.809,00	15.911.803.813,00	(660.078.996,00)	96,02
5.1	BELANJA OPERASI	4.490.667.511,00	4.394.274.140,00	(96.393.371,00)	97,85
5.1.1	Belanja Pegawai	6.020.000,00	5.340.000,00	(680.000,00)	88,70
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.484.647.511,00	4.388.934.140,00	(95.713.371,00)	97,87
5.2	BELANJA MODAL	12.081.215.298,00	11.517.529.673,00	(563.685.625,00)	95,33
27	Pertanian	20.723.157.405,00	20.319.857.788,00	(403.299.617,00)	98,05
3-27.2-09.3-25.01	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.723.157.405,00	20.319.857.788,00	(403.299.617,00)	98,05
5.1	BELANJA OPERASI	20.532.698.405,00	20.130.172.788,00	(402.525.617,00)	98,04
5.1.1	Belanja Pegawai	16.142.096.155,00	15.802.745.838,00	(339.350.317,00)	97,90
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.437.886.450,00	2.400.236.050,00	(37.650.400,00)	98,46
5.1.5	Belanja Hibah	1.952.715.800,00	1.927.190.900,00	(25.524.900,00)	98,69
5.2	BELANJA MODAL	190.459.000,00	189.685.000,00	(774.000,00)	99,59
28	Perdagangan	7.586.624.225,00	7.477.357.343,00	(109.266.882,00)	98,56
0-00.0-00.0-00.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	7.586.624.225,00	7.477.357.343,00	(109.266.882,00)	98,56
5.1	BELANJA OPERASI	2.648.267.525,00	2.543.187.883,00	(105.079.642,00)	96,03
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.648.267.525,00	2.543.187.883,00	(105.079.642,00)	96,03
5.2	BELANJA MODAL	4.938.356.700,00	4.934.169.460,00	(4.187.240,00)	99,92
29	Perindustrian	7.935.711.861,00	7.734.975.175,00	(200.736.686,00)	97,47
0-00.0-00.0-00.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	7.935.711.861,00	7.734.975.175,00	(200.736.686,00)	97,47
5.1	BELANJA OPERASI	7.362.637.841,00	7.173.939.575,00	(188.698.266,00)	97,44
5.1.1	Belanja Pegawai	5.690.914.285,00	5.557.580.727,00	(133.333.558,00)	97,66
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.671.723.556,00	1.616.358.848,00	(55.364.708,00)	96,69
5.2	BELANJA MODAL	573.074.020,00	561.035.600,00	(12.038.420,00)	97,90
30	Transmigrasi	84.828.600,00	62.422.400,00	(22.406.200,00)	73,59
0-00.0-00.0-00.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	84.828.600,00	62.422.400,00	(22.406.200,00)	73,59
5.1	BELANJA OPERASI	84.828.600,00	62.422.400,00	(22.406.200,00)	73,59
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.828.600,00	62.422.400,00	(22.406.200,00)	73,59
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	84.447.028.719,00	82.137.539.576,00	(2.309.489.143,00)	97,27
31	Sekreariat Daerah	39.094.652.920,00	37.838.029.496,00	(1.256.623.424,00)	96,79
4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	39.094.652.920,00	37.838.029.496,00	(1.256.623.424,00)	96,79
5.1	BELANJA OPERASI	35.933.410.120,00	35.081.078.496,00	(852.331.624,00)	97,63

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)					
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)				
5	32	5.1.1	Belanja Pegawai	17.095.140.120,00	16.804.160.840,00	(290.979.280,00)	98,30		
		5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.235.520.000,00	13.676.267.656,00	(559.252.344,00)	96,07		
		5.1.5	Belanja Hibah	4.602.750.000,00	4.600.650.000,00	(2.100.000,00)	99,95		
		5.2	BELANJA MODAL	3.161.242.800,00	2.756.951.000,00	(404.291.800,00)	87,21		
			Sekretariat DPRD	45.352.375.799,00	44.299.510.080,00	(1.052.865.719,00)	97,68		
		0-00.0-00.0-00.00	SEKRETARIAT DPRD	45.352.375.799,00	44.299.510.080,00	(1.052.865.719,00)	97,68		
			BELANJA OPERASI	44.736.233.799,00	43.714.366.580,00	(1.021.867.219,00)	97,72		
			5.1.1	Belanja Pegawai	23.687.053.313,00	23.339.453.328,00	(347.599.985,00)	98,53	
			5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.049.180.486,00	20.374.913.252,00	(674.267.234,00)	96,80	
			5.2	BELANJA MODAL	616.142.000,00	585.143.500,00	(30.998.500,00)	94,97	
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	568.153.161.037,83	553.707.579.617,00	(14.445.581.420,83)	97,46		
		33		Perencanaan	5.192.382.602,00	4.481.282.708,00	(711.099.894,00)	86,30	
			5-01.5-05.0-00.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.192.382.602,00	4.481.282.708,00	(711.099.894,00)	86,30	
				BELANJA OPERASI	5.192.382.602,00	4.481.282.708,00	(711.099.894,00)	86,30	
				5.1.1	Belanja Pegawai	3.713.355.621,00	3.470.339.664,00	(243.015.957,00)	93,46
				5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.479.026.981,00	1.010.943.044,00	(468.083.937,00)	68,35
		34		Keuangan	554.511.379.851,83	541.117.213.799,00	(13.394.166.052,83)	97,58	
			5-02.0-00.0-00.04	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	554.511.379.851,83	541.117.213.799,00	(13.394.166.052,83)	97,58	
				BELANJA OPERASI	20.674.694.934,00	19.293.633.456,00	(1.381.061.478,00)	93,32	
				5.1.1	Belanja Pegawai	13.983.104.143,00	12.800.194.901,00	(1.182.909.242,00)	91,54
				5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.628.379.470,00	6.430.227.234,00	(198.152.236,00)	97,01
				5.1.3	Belanja Bunga	63.211.321,00	63.211.321,00	0,00	100,00
				5.2	BELANJA MODAL	359.533.250,00	356.797.000,00	(2.736.250,00)	99,24
				5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.239.022.841,83	261.499.088,00	(3.977.523.753,83)	6,17
			5.4	BELANJA TRANSFER	529.238.128.826,00	521.205.284.255,00	(8.032.844.571,00)	98,48	
	35		Kepegawaian	7.727.016.584,00	7.396.463.398,00	(330.553.186,00)	95,72		
		0-00.0-00.0-00.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7.727.016.584,00	7.396.463.398,00	(330.553.186,00)	95,72		
			BELANJA OPERASI	7.655.517.584,00	7.331.803.398,00	(323.714.186,00)	95,77		
			5.1.1	Belanja Pegawai	4.768.932.384,00	4.715.714.568,00	(53.217.816,00)	98,88	
			5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.886.585.200,00	2.616.088.830,00	(270.496.370,00)	90,63	
			5.2	BELANJA MODAL	71.499.000,00	64.660.000,00	(6.839.000,00)	90,43	
	36		Pendidikan dan Pelatihan	562.927.000,00	553.307.402,00	(9.619.598,00)	98,29		

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)				
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)			
6	37	0-00.0-00.0-00.00						
		5.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	562.927.000,00	553.307.402,00	(9.619.598,00)	98,29	
		5.1.1	BELANJA OPERASI	562.927.000,00	553.307.402,00	(9.619.598,00)	98,29	
		5.1.1.1	Belanja Pegawai	1.360.000,00	680.000,00	(680.000,00)	50,00	
		5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	561.567.000,00	552.627.402,00	(8.939.598,00)	98,41	
			Penelitian dan Pengembangan	159.455.000,00	159.312.310,00	(142.690,00)	99,91	
	5-01.5-05.0-00.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	159.455.000,00	159.312.310,00	(142.690,00)	99,91		
	5.1	BELANJA OPERASI	159.455.000,00	159.312.310,00	(142.690,00)	99,91		
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	159.455.000,00	159.312.310,00	(142.690,00)	99,91		
	7	38		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.359.799.735,00	10.005.395.985,00	(354.403.750,00)	96,58
				Inspektorat	10.359.799.735,00	10.005.395.985,00	(354.403.750,00)	96,58
			0-00.0-00.0-00.00	INSPEKTORAT	10.359.799.735,00	10.005.395.985,00	(354.403.750,00)	96,58
5.1			BELANJA OPERASI	10.358.850.535,00	10.004.745.985,00	(354.104.550,00)	96,58	
5.1.1			Belanja Pegawai	7.595.888.470,00	7.330.466.497,00	(265.421.973,00)	96,51	
5.1.2			Belanja Barang dan Jasa	2.762.962.065,00	2.674.279.488,00	(88.682.577,00)	96,79	
5.2		BELANJA MODAL	949.200,00	650.000,00	(299.200,00)	68,48		
		UNSUR KEWILAYAHAN	72.741.702.976,00	68.474.899.389,00	(4.266.803.587,00)	94,13		
0-00.0-00.0-00.00		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	72.741.702.976,00	68.474.899.389,00	(4.266.803.587,00)	94,13		
39		0-00.0-00.0-00.00		KECAMATAN GRABAG	2.851.486.168,00	2.786.202.818,00	(65.283.350,00)	97,71
			5.1	BELANJA OPERASI	2.851.486.168,00	2.786.202.818,00	(65.283.350,00)	97,71
			5.1.1	Belanja Pegawai	2.158.346.768,00	2.105.668.780,00	(52.677.988,00)	97,56
	5.1.2		Belanja Barang dan Jasa	693.139.400,00	680.534.038,00	(12.605.362,00)	98,18	
	0-00.0-00.0-00.00		KECAMATAN NGOMBOL	3.248.338.136,00	3.125.614.813,00	(122.723.323,00)	96,22	
	5.1		BELANJA OPERASI	2.898.338.136,00	2.777.330.431,00	(121.007.705,00)	95,82	
	5.1.1	Belanja Pegawai	2.193.241.836,00	2.088.752.329,00	(104.489.507,00)	95,24		
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	705.096.300,00	688.578.102,00	(16.518.198,00)	97,66		
	5.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	348.284.382,00	(1.715.618,00)	99,51		
	0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN PURWODADI	2.967.707.719,00	2.830.169.017,00	(137.538.702,00)	95,37		
	5.1	BELANJA OPERASI	2.967.707.719,00	2.830.169.017,00	(137.538.702,00)	95,37		
	5.1.1	Belanja Pegawai	2.384.864.511,00	2.255.141.538,00	(129.722.973,00)	94,56		
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	582.843.208,00	575.027.479,00	(7.815.729,00)	98,66			
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN BAGELEN	2.629.618.280,00	2.499.617.741,00	(130.000.539,00)	95,06			
5.1	BELANJA OPERASI	2.629.618.280,00	2.499.617.741,00	(130.000.539,00)	95,06			

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.1	Belanja Pegawai	2.054.172.880,00	1.954.103.841,00	(100.069.039,00)	95,13
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	575.445.400,00	545.513.900,00	(29.931.500,00)	94,80
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN KALIGESING	2.240.788.574,00	2.027.195.523,00	(213.593.051,00)	90,47
5.1	BELANJA OPERASI	2.240.788.574,00	2.027.195.523,00	(213.593.051,00)	90,47
5.1.1	Belanja Pegawai	1.665.890.974,00	1.462.471.833,00	(203.419.141,00)	87,79
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	574.897.600,00	564.723.690,00	(10.173.910,00)	98,23
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN PURWOREJO	19.373.373.276,00	17.795.050.293,00	(1.578.322.983,00)	91,85
5.1	BELANJA OPERASI	16.011.750.476,00	14.466.021.193,00	(1.545.729.283,00)	90,35
5.1.1	Belanja Pegawai	11.798.348.276,00	10.356.524.010,00	(1.441.824.266,00)	87,78
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.213.402.200,00	4.109.497.183,00	(103.905.017,00)	97,53
5.2	BELANJA MODAL	3.361.622.800,00	3.329.029.100,00	(32.593.700,00)	99,03
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN BANYUURIP	5.972.841.767,00	5.598.191.688,00	(374.650.079,00)	93,73
5.1	BELANJA OPERASI	5.684.973.767,00	5.311.057.148,00	(373.916.619,00)	93,42
5.1.1	Belanja Pegawai	4.158.579.167,00	3.859.425.806,00	(299.153.361,00)	92,81
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.526.394.600,00	1.451.631.342,00	(74.763.258,00)	95,10
5.2	BELANJA MODAL	287.868.000,00	287.134.540,00	(733.460,00)	99,75
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN BAYAN	3.405.409.549,00	3.266.183.548,00	(139.226.001,00)	95,91
5.1	BELANJA OPERASI	3.405.409.549,00	3.266.183.548,00	(139.226.001,00)	95,91
5.1.1	Belanja Pegawai	2.542.641.949,00	2.432.839.389,00	(109.802.560,00)	95,68
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	862.767.600,00	833.344.159,00	(29.423.441,00)	96,59
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN KUTOARJO	9.343.511.102,00	9.003.676.561,00	(339.834.541,00)	96,36
5.1	BELANJA OPERASI	9.165.502.502,00	8.831.060.161,00	(334.442.341,00)	96,35
5.1.1	Belanja Pegawai	7.124.193.718,00	6.828.815.851,00	(295.377.867,00)	95,85
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.041.308.784,00	2.002.244.310,00	(39.064.474,00)	98,09
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	178.008.600,00	172.616.400,00	(5.392.200,00)	96,97
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN BUTUH	3.077.895.375,00	2.907.675.718,00	(170.219.657,00)	94,47
5.1	BELANJA OPERASI	3.077.895.375,00	2.907.675.718,00	(170.219.657,00)	94,47
5.1.1	Belanja Pegawai	2.355.973.575,00	2.201.689.477,00	(154.284.098,00)	93,45
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	721.921.800,00	705.986.241,00	(15.935.559,00)	97,79
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN PITURUH	3.224.221.700,00	3.110.355.935,00	(113.865.765,00)	96,47

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1	BELANJA OPERASI	3.224.221.700,00	3.110.355.935,00	(113.865.765,00)	96,47
5.1.1	Belanja Pegawai	2.386.647.100,00	2.273.070.787,00	(113.576.313,00)	95,24
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	837.574.600,00	837.285.148,00	(289.452,00)	99,97
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN KEMIRI	3.101.224.600,00	2.874.780.123,00	(226.444.477,00)	92,70
5.1	BELANJA OPERASI	3.072.628.600,00	2.846.290.123,00	(226.338.477,00)	92,63
5.1.1	Belanja Pegawai	2.372.951.500,00	2.187.072.963,00	(185.878.537,00)	92,17
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	699.677.100,00	659.217.160,00	(40.459.940,00)	94,22
5.2	BELANJA MODAL	28.596.000,00	28.490.000,00	(106.000,00)	99,63
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN BRUNO	2.709.228.065,00	2.512.614.704,00	(196.613.361,00)	92,74
5.1	BELANJA OPERASI	2.709.228.065,00	2.512.614.704,00	(196.613.361,00)	92,74
5.1.1	Belanja Pegawai	2.022.734.365,00	1.842.292.322,00	(180.442.043,00)	91,08
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	686.493.700,00	670.322.382,00	(16.171.318,00)	97,64
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN GEBANG	3.596.289.785,00	3.444.637.487,00	(151.652.298,00)	95,78
5.1	BELANJA OPERASI	3.596.289.785,00	3.444.637.487,00	(151.652.298,00)	95,78
5.1.1	Belanja Pegawai	2.741.329.354,00	2.606.624.860,00	(134.704.494,00)	95,09
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	854.960.431,00	838.012.627,00	(16.947.804,00)	98,02
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN LOANO	2.394.501.028,00	2.232.727.942,00	(161.773.086,00)	93,24
5.1	BELANJA OPERASI	2.394.501.028,00	2.232.727.942,00	(161.773.086,00)	93,24
5.1.1	Belanja Pegawai	1.744.974.228,00	1.585.342.358,00	(159.631.870,00)	90,85
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	649.526.800,00	647.385.584,00	(2.141.216,00)	99,67
0-00.0-00.0-00.00	KECAMATAN BENER	2.605.267.852,00	2.460.205.478,00	(145.062.374,00)	94,43
5.1	BELANJA OPERASI	2.605.267.852,00	2.460.205.478,00	(145.062.374,00)	94,43
5.1.1	Belanja Pegawai	1.915.472.202,00	1.775.642.936,00	(139.829.266,00)	92,70
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	689.795.650,00	684.562.542,00	(5.233.108,00)	99,24
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.087.765.653,00	3.043.635.123,00	(44.130.530,00)	98,57
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	3.087.765.653,00	3.043.635.123,00	(44.130.530,00)	98,57
0-00.0-00.0-00.00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.087.765.653,00	3.043.635.123,00	(44.130.530,00)	98,57
5.1	BELANJA OPERASI	3.087.765.653,00	3.043.635.123,00	(44.130.530,00)	98,57
5.1.1	Belanja Pegawai	1.317.125.121,00	1.313.154.011,00	(3.971.110,00)	99,70
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	672.667.600,00	632.508.180,00	(40.159.420,00)	94,03
5.1.5	Belanja Hibah	1.097.972.932,00	1.097.972.932,00	0,00	100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(129.340.034.947,83)	154.764.754.198,00	284.104.789.145,83	(119,66)

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1 1 5-02.0-00.0-00.04 6.1 6.1.1 6.1.5 6.2 6.2.3	PEMBIAYAAN DAERAH				
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	Keuangan	167.585.535.247,83	167.747.966.065,83	162.430.818,00	100,10
	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	167.585.535.247,83	167.747.966.065,83	162.430.818,00	100,10
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	148.462.785.097,83	148.625.215.915,83	162.430.818,00	100,11
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	148.165.025.028,83	148.165.025.028,83	0,00	100,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	297.760.069,00	460.190.887,00	162.430.818,00	154,55
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.122.750.150,00	19.122.750.150,00	0,00	100,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.122.750.150,00	19.122.750.150,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	129.340.034.947,83	129.502.465.765,83	162.430.818,00	100,13
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	284.267.219.963,83	284.267.219.963,83	0,00	

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN